

**KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM
MENGOPTIMALKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN
KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN**

Fadhil Azhar Rahmat

NPP. 31.0403

Asdaf Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

Program Studi: Pemberdayaan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat

Email: whahah854@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Kartiwi, S.Sos., M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *To achieve the expected development achievements, it is necessary to improve the performance of various agencies which can be seen from the performance of their apparatus. Because in carrying out development, there are still various obstacles faced by the Pandeglang Regency PUPR Service. **Purpose:** This research purpose to find out, analyze and describe the performance of the PUPR Service and efforts to optimize road infrastructure development in Pandeglang Regency. **Method:** This research employs a qualitative approach with an inductive method. The data collection techniques include interviews, observations, and documentation. **Result:** The results of the research show that the Responsiveness performance of the apparatus within the PUPR Department of Pandeglang Regency has been running quite well and the Responsiveness performance has been carried out according to correct administrative procedures. As well as the accountability performance of the Pandeglang Regency PUPR Service in providing excellent service to the community has been going well, however there is still a lack of facilities and infrastructure as well as apparatus resources to support improving services within the Pandeglang Regency PUPR Service environment. **Conclusion:** The research results show that the performance of the Public Works and Spatial Planning Department in Pandeglang Regency is quite good but needs to be improved. Even though the aspects of productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability are good, there is still a need to focus on improving human resources and infrastructure. Suggestions for improving performance include increasing routine supervision, outreach to the public about the importance of road infrastructure, increasing manpower for field supervision, and improving physical infrastructure and information technology for better services. **Keywords:** Pandeglang Regency PUPR Service, Performance, Road Infrastructure Development*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Untuk mencapai pencapaian pembangunan yang diharapkan maka perlu adanya peningkatan kinerja dari berbagai instansi yang dapat dilihat dari kinerja aparaturnya. Karena dalam menjalankan pembangunan masih ditemukan adanya berbagai kendala yang dihadapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisa serta mendeskripsikan Kinerja Dinas PUPR dan upaya dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang. **Metode:** Penelitian ini

menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan wawancara, observasi, kemudian dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Responsivitas aparatur di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang sudah berjalan cukup baik dan kinerja Responsibilitas sudah terlaksana sesuai prosedur administrasi yang benar. Serta kinerja akuntabilitas Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik, namun masih di temukan kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya aparatur sebagai penunjang dalam meningkatkan pelayanan pada lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang. **Kesimpulan:** Hasil penelitian menunjukkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pandeglang cukup baik namun perlu ditingkatkan. Meskipun aspek produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas sudah baik, masih perlu fokus pada peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur. Saran untuk meningkatkan kinerja meliputi peningkatan pengawasan rutin, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya infrastruktur jalan, penambahan tenaga kerja untuk pengawasan di lapangan, dan peningkatan infrastruktur fisik serta teknologi informasi untuk pelayanan yang lebih baik.

Kata kunci: *Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang, Kinerja, Pembangunan Infrastruktur Jalan*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik , dijelaskan bahwa pelayanan adalah tugas pokok para aparatur selaku pegawai yang mendedikasikan diri pada negara dan rakyat. Seorang aparatur yang menjalankan tugas sebagai petugas yang memberikan pelayanan wajib mementingkan kepentingan publik daripada kepentingan pribadinya, memudahkan urusan publik, serta memberikan rasa puas bagimasyarakat. Pelayanan publik tidak terlepas dari aspek kehidupan, adapun pelayanan tersebut termasuk dalam kegiatan memberikan layanan kepada publik (Gerrish, 2016).

Tiga fungsi, hakiki pemertahan menurut Riyas Rasyid , yaitu fungsi pelayanan (*service*), fungsi pemberdayaan (*empowerment*), dan fungsi pembangunan (*development*). Dalam konteks ini, pelayanan merujuk pada usaha pemerintahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. pemberdayaan mengacu pada usaha untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, sedangkan pembangunan mencakup berbagai aspek pembangunan dalam masyarakat (Rasyid dalam Labolo, 2013). Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) adalah instansi yang dibawah oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kehadiran Dinas Pekerjaan Umum memberi warna terhadap pembangunan di Daerah. Dinas Pekerjaan Umum termasuk dalam satuan kerja daerah yang mempunyai kewenangan, tugas dan tanggungjawab guna menjalankan otonomi daerah, desentralisasi pada bidang pekerjaan umum (Yasni & Nur Fajri, 2022).

Infrastruktur ialah bentuk modal publik yang terdapat dalam bentuk jalan raya, jembatan, saluran drainase, yang merupakan bentuk nyata investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jalan adalah salah satu bagian penting untuk sistem transportasi, fungsinya sebagai fasilitas untuk memperlancar proses dan jalannya perekonomian nasional, dan mengembangkan potensi suatu daerah tertentu. Dengan adanya pembangunan ini diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan dan pemerataan pembangunan di setiap daerah, meningkatkan kesatuan nasional agar pertahanan dan keamanan negara semakin kuat, dan menciptakan sarana pembangunan. Infrastruktur jalan adalah

aspek terpenting dalam mewujudkan kemajuan dan pembangunan suatu wilayah yang dilaluinya. Fungsi utama dibangunnya infrastruktur adalah sebagai sarana untuk menyambungkan dan menghubungkan antara daerah satu dengan lainnya, sehingga proses kehidupan masyarakat akan lebih mudah (Andani, 2022).

Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang (Sukirno, 1985). Pembangunan ekonomi berprioritas untuk mensejahterakan rakyatnya. Berhasil tidaknya suatu pemerintahan dapat dilihat bagaimana kondisi perekonomian di negara tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah tercapainya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dan kemiskinan memiliki keterkaitan yang erat. Pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat menyebabkan meningkatnya insiden kemiskinan di suatu negara. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang artinya kenaikan pertumbuhan ekonomi menurunkan tingkat kemiskinan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat permasalahan berkaitan dengan infrastruktur yang ada di Kabupaten Pandeglang. Tabel berikut merupakan kondisi jalan di Kabupaten Pandeglang tahun 2022.

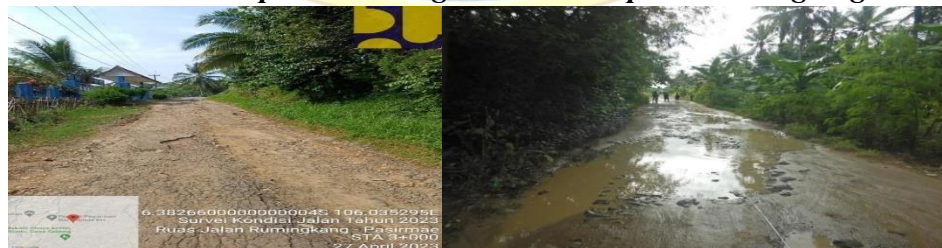
Tabel 1. 1
Kondisi Jalan Kabupaten Pandeglang Tahun 2022

Jumlah Ruas Jalan sebanyak 233 Ruas Jalan dengan total panjang 723,03 Kilometer	
Kondisi Jalan Tahun 2022	
Baik	= 410,3 Kilometer (56,75%)
Sedang	= 85,03 Kilometer (11,76%)
Rusak Ringan	= 54,70 Kilometer (7,57%)
Rusak Berat	= 173 Kilometer (23,93%)

Sumber: (Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang, 2022)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, ruas jalan rusak di Kabupaten Pandeglang dari 723,03 Kilometer, terdapat 23,93 persen ruas jalan dalam kondisi rusak. Gambar berikut merupakan kondisi ruas jalan yang berada di Kabupaten Pandeglang.

Gambar 1. 1
Kondisi Beberapa Jalan Yang Ada Di Kabupaten Pandeglang



Sumber: (Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang, 2022)

Kondisi jalan pada gambar tersebut menghambat jalur transportasi dikarenakan ruas jalan yang kecil, jalur yang masih rusak dan tidak memenuhi standar jalur transportasi yang berlaku atau bisa disebut dengan kondisi jalan yang tergolong rusak berat. Kondisi jalan tersebut yang membuat peningkatan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh pandeglang menjadi terhambat. Kondisi jalan yang baik meningkatkan daya saing produk suatu daerah karena meminimalkan biaya transportasinya sehingga harga jual produk masyarakat dapat lebih tinggi. Terutama lagi untuk daerah seperti Kabupaten Pandeglang yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan infrastruktur. Penelitian Hany Amalia yang berjudul "Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang" hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam program pembangunan drainase Kota Dumai belum mencapai hasil yang maksimal, dimana dalam pelaksanaannya sumber daya manusia yang berkualitas masih terbatas, anggaran yang kurang memadai dan minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana drainase menjadi sebab program pembangunan drainase yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kurang dirasakan manfaatnya (Amalia, 2021). Penelitian Bella Fitrianti, Meyzi Heriyanto, dan Seno Andri yang berjudul "Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021" hasil penelitian menunjukkan bahwa, produktivitas kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi dalam pemeliharaan infrastruktur jalan telah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat pada persentase kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi hingga triwulan 2 telah mengalami peningkatan. Indikator responsibilitas kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi dalam pemeliharaan infrastruktur jalan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Indikator akuntabilitas Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi dalam pemeliharaan infrastruktur jalan dilakukan dengan memberikan informasi kepada masyarakat berupa prosedur pelayanan, besaran anggaran yang digunakan dalam kegiatan pemeliharaan infrastruktur jalan, serta laporan anggaran per triwulan maupun dalam satu tahun anggaran terhadap kegiatan yang telah dilakukan (Fitrianti et al., 2022). Penelitian Jamalia Wahda dan Abdul Sadad yang berjudul "Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam mengelola Drainase di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Binawidya)", hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kinerja DPUPR Kota Pekanbaru masih kurang baik. Hal ini disebabkan oleh Produktivitas Kinerja DPUPR pada pengelolaan drainase masih kurang efektif, karena masih banyaknya titik banjir yang menjadi permasalahannya. Kualitas layanan DPUPR dalam pengelolaan drainase sudah baik (Wahda & Sadad. Abdul, 2023). Penelitian Arfindy Sri Nur, Ahmad Sihabudin, dan Ace Hasan Syadzily yang berjudul "Kinerja Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Dalam Perspektif Pelayanan Publik Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Banten Tahun 2017" hasil dari penelitian ini adalah kinerja Dinas PUPR Provinsi Banten dapat dikatakan cukup baik mengenai adanya beberapa pembangunan jalan dan jembatan seperti kegagalan pembangunan dan keterlambatan, pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan visi dan misi. Organisasi (Nur et al., 2020). Terakhir, penelitian Silvy Sondari dan Nopylasari Nopy yang berjudul "Kinerja Program Pembangunan Sarana

dan Prasarana Air Bersih Perdesaan di Kabupaten Subang” hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kinerja PUPR dalam hal ini belum optimal dikarenakan unsur-unsur efektif, efisien, kualitas, ketepatan waktu dan produktivitas belum sepenuhnya berjalan dengan baik (Sondari & Nopy, 2022).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Terdapat perbedaan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu, dimana lokasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pandeglang. Teori yang digunakan oleh penulis menggunakan teori Pengukuran Kinerja Sektor Publik menurut Agus Dwiyanto yang terdiri dari lima dimensi yaitu, Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas (Dwiyanto, 2018).

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisa serta mendeskripsikan Kinerja Dinas PUPR dan upaya dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai sosial yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu kejadian atau fenomena dan kenyataan sosial. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berdasar pada postpositivisme, yang dipakai untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2015).

Penulis mengumpulkan observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan apa yang dijelaskan Simangunsong (Simangunsong, 2017). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 13 informan yang terdiri dari, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang, Kepala Bidang Bina Program, Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, Staff Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, Konsultan Perencana, Kontraktor Pelaksanaan, Konsultan Pengawas sebanyak tiga orang dan Masyarakat di Lokasi Penelitian (Jalan kabupaten Pandeglang, Rumingkang-Pasirmae) sebanyak empat orang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Mengoptimalkan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Pandeglang

3.1.1. Produktivitas

Kinerja aparatur di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pandeglang, harus seimbang antara efisiensi tugas dan efektivitas pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tanggung jawab utama dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang. Namun, pembangunan infrastruktur jalan di daerah ini belum memenuhi standar nasional, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Banyaknya kerusakan jalan dan jembatan di Kabupaten Pandeglang menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan infrastruktur.

Untuk mengatasi masalah ini, DPUPR menyusun beberapa program kerja, seperti meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan hingga 60%, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan jalan, melibatkan OPD dalam optimalisasi pembangunan, bekerjasama dengan pengembang, dan meningkatkan pengendalian terhadap pembangunan jalan. Namun, program sosialisasi kepada masyarakat belum optimal karena keterbatasan tenaga kerja dan penyampaian yang belum menyeluruh. Pengendalian pembangunan dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012, dengan penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) sebagai bentuk pengendalian dan rekomendasi terkait pembangunan. Kerjasama dengan pengembang dan pengendalian pelaksanaan pembangunan juga dilakukan untuk menekan pelanggaran dan memastikan pembangunan sesuai dengan rencana dan peraturan daerah. Dalam aspek anggaran, DPUPR memiliki alokasi khusus untuk pengadaan pembangunan jalan, yang memerlukan pengelolaan dan pengawasan berkala. Kebutuhan anggaran yang besar disebabkan oleh skala dan luasnya proyek yang terus berkembang.

Produktivitas dalam kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang melibatkan keseimbangan antara efisiensi pelaksanaan tugas dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Meski ada tantangan seperti kerusakan jalan yang luas dan keterbatasan tenaga kerja, DPUPR berupaya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan melalui berbagai program kerja, sosialisasi, kerjasama dengan pengembang, dan pengendalian pembangunan sesuai peraturan daerah. Upaya ini didukung oleh anggaran khusus dan pengawasan ketat untuk memastikan pembangunan infrastruktur jalan yang efektif dan efisien.

3.1.2 Kualitas Layanan

Kualitas layanan berfokus pada hasil pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, yang dapat dirasakan langsung oleh mereka. Ini termasuk informasi yang mudah diakses karena berkaitan langsung dengan fenomena di lapangan dan pendapat masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana adalah elemen penting yang membantu organisasi mencapai tujuan dan meningkatkan produktivitas, yang pada akhirnya berdampak pada pelayanan prima dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang menempatkan kebutuhan sarana dan prasarana sebagai prioritas utama. Kepala Dinas PUPR, Bapak Asep Rahmat S.T, menyatakan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana di dinas tersebut sudah sesuai dengan standar dan proyeksi kebutuhan untuk satu hingga dua tahun mendatang telah disusun. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa kualitas sarana dan prasarana di DPUPR sangat baik dan mendapatkan pemeliharaan yang baik.

Upaya Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan tidak cacat memberikan dampak positif bagi pengelolaan dan eksistensi infrastruktur jalan. Ini mendukung aksesibilitas dan merupakan indikator kualitas layanan yang mencakup transparansi informasi kepada masyarakat. DPUPR berusaha meningkatkan kualitas layanan melalui pembangunan jalan untuk mempermudah akses umum, seperti yang terlihat pada Jalan Lintas Timur di Kabupaten Pandeglang, yang memudahkan mobilitas masyarakat.

Roni Boy Kurniawan S.T., M.T, Kabid Bina Kontruksi, menekankan pentingnya peran DPUPR dalam mengatur tata wilayah yang mempengaruhi pembangunan jalan. Optimalisasi fungsi

jalan ini mendukung aksesibilitas dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang menekankan pentingnya sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan produktivitas. Pemenuhan sarana dan prasarana yang baik dan pemeliharannya telah memberikan dampak positif pada infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang, yang mendukung aksesibilitas dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Upaya DPUPR dalam menyediakan layanan yang profesional dan transparan menunjukkan komitmen mereka terhadap pelayanan prima.

3.1.3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk memahami kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang menerapkan prinsip responsivitas ini dengan menyusun misi yang sejalan dengan misi Kabupaten Pandeglang. Misi tersebut memberikan batasan tugas pokok dan fungsi dalam menyusun agenda dan mengembangkan program pelayanan publik, sehingga mampu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Misi DPUPR meliputi peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dengan perencanaan program yang terpadu, pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung keterpaduan wilayah, peningkatan kualitas pemukiman melalui upaya penyehatan lingkungan dan penyediaan sarana dan prasarana pemukiman, serta penataan bangunan dan ruang untuk menciptakan wilayah/kawasan terpadu. Selain itu, misi mereka juga mencakup pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS) demi menjaga ketersediaan Sumber Daya Air (SDA) secara menyeluruh, aman, terpadu, dan berkelanjutan, serta optimalisasi operasional dan pemeliharaan bagi sarana dan prasarana SDA untuk menciptakan sistem pengairan yang handal, adil, dan merata.

DPUPR terus melaksanakan misi ini untuk menciptakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan di Kabupaten Pandeglang. Fokus utama mereka adalah mengoptimalkan fungsi infrastruktur jalan di daerah tersebut. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan di DPUPR menyusun peta pembangunan jaringan jalan sebagai acuan dalam pemetaan lahan dan alih fungsi guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat sesuai kebutuhan dan aspirasi mereka.

Roni Boy Kurniawan S.T., M.T., dalam wawancaranya pada 16 Januari 2024, menyatakan bahwa penambahan dan perluasan jalan merupakan salah satu pelayanan yang rencananya akan terealisasi dalam satu hingga dua tahun ke depan. Namun, proses ini masih dalam tahap pelaksanaan karena adanya kebutuhan sosialisasi dan perhitungan biaya ganti rugi terhadap lahan yang terkena pembangunan. Sampai saat ini, pencapaian mengenai peningkatan pemenuhan perluasan dan pembangunan jalan masih dalam proses yang sedang dijalankan oleh DPUPR, dikarenakan lamanya proses pergantian rugi kepada masyarakat dan dana yang harus sesuai dengan anggaran setiap tahun. Pembangunan dan perluasan jalan merupakan program DPUPR dalam menciptakan Kabupaten Pandeglang dengan tingkat aksesibilitas yang baik dan mendukung keterpaduan wilayah.

3.1.4. Responsibilitas

Responsibilitas adalah kegiatan yang menunjukkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prinsip administrasi yang benar, berdasarkan kebijakan birokrasi baik secara eksplisit maupun implisit. Responsibilitas dinilai sebagai bentuk pertanggungjawaban atas realisasi pekerjaan dengan program kerja yang telah dibuat, tanpa melanggar aturan dan menjaga ketertiban administrasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mendukung berjalannya program dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program.

Pelaksanaan kerjasama dilakukan dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Bappeda, badan ini bertugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan, berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjalankan tugas pokoknya, Bappeda Kabupaten Pandeglang memiliki beberapa fungsi, di antaranya pembinaan dan pelaksanaan perencanaan daerah yang mencakup perencanaan bidang fisik dan bina marga, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya.

DPUPR mendukung pengoptimalan pengelolaan, perawatan, dan pembaharuan pembangunan jalan dengan melibatkan masyarakat Kabupaten Pandeglang serta bantuan dari developer yang telah ditetapkan. DPUPR melakukan pengawasan dan pengendalian melalui pelaksanaan kebijakan untuk mencegah adanya pemukiman liar dan perkebunan liar yang menghambat proses pembangunan jalan.

Bapak Roni Boy Kurniawan S.T., M.T., pada wawancaranya pada Selasa, 16 Januari 2024, mengutarakan bahwa banyaknya pemukiman yang memakan ruas jalan menjadi perhatian utama dalam pengoptimalan pembangunan jalan. Banyak ruas jalan telah dibangun oleh masyarakat sebagai pemilik sah tanah, dan tingginya pembangunan di Kabupaten Pandeglang untuk permukiman dan perkebunan menyebabkan tata wilayah tidak sesuai rencana. Hal ini menjadi tugas tersendiri bagi DPUPR dalam mengoptimalkan pembangunan jalan di Kabupaten Pandeglang.

Rendahnyaperhatian masyarakat terhadap dampak pembangunan liar tersebut membuat DPUPR dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang perlu bekerjasama untuk memaksimalkan kinerja satuan organisasi perangkat daerah. Kerjasama ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama demi kesejahteraan masyarakat secara utuh.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang menunjukkan responsibilitas ini melalui kerjasama dengan Bappeda dan OPD lainnya untuk memastikan pengelolaan, perawatan, dan pembangunan jalan berjalan sesuai rencana dan peraturan yang berlaku. Tantangan seperti pemukiman liar yang memakan ruas jalan dan tingginya pembangunan permukiman dan perkebunan memerlukan perhatian khusus dan kolaborasi antara DPUPR dan masyarakat. Upaya bersama ini bertujuan untuk mencapai pembangunan yang optimal dan kesejahteraan masyarakat.

3.1.5. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam konteks birokrasi publik mengacu pada sejauh mana kebijakan dan kegiatan birokrasi tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat untuk kepentingan publik. Ini

menandakan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), harus menggunakan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam merumuskan program dan melaksanakan kegiatan guna menghasilkan pelayanan prima dan mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Melalui wawancaranya pada 15 Januari 2024, Bapak Asep Rahmat S.T. menyampaikan bahwa DPUPR melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Mereka mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DPUPR Kabupaten Pandeglang. Peraturan ini memastikan bahwa pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada Bupati serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Peraturan Bupati tersebut menekankan pentingnya penerapan prinsip koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi yang baik dalam lingkungan dinas maupun unit lain. Setiap pimpinan dan unit diwajibkan menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan bagian tugas masing-masing.

Bapak Roni Boy Kurniawan S.T., M.T., menjelaskan pada 16 Januari 2024 bahwa pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di DPUPR sudah berjalan dengan baik. Mereka melaksanakan rapat rutin setiap 2-3 minggu sekali atau ketika ada informasi hasil rapat dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Semua informasi disampaikan kepada tenaga kerja di setiap unit agar petunjuk dan arahan dari pusat dapat diterima dengan baik, dan penyusunan program dapat menyesuaikan dengan kebijakan yang ada. Koordinasi dan sinkronisasi antar unit dilakukan secara rutin untuk menjaga komunikasi dan transparansi informasi dalam internal unit. Ini akan dipertanggungjawabkan oleh kepala unit/bagian kepada Kepala DPUPR, yang kemudian dievaluasi dan ditindaklanjuti. Bapak Asep Rahmat S.T. menjelaskan bahwa sebagai pimpinan, ia melakukan pengecekan berkala terhadap dokumen harian yang menjadi laporan kinerja para pegawai untuk memastikan bahwa kinerja mereka sesuai dengan SOP yang berlaku dan mampu memenuhi kriteria standar pelayanan minimal suatu OPD. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan dinas sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas dalam birokrasi publik berarti setiap kebijakan dan kegiatan harus tunduk pada aturan dan pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, memastikan bahwa pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DPUPR Kabupaten Pandeglang menunjukkan akuntabilitas melalui penerapan SOP, koordinasi, dan sinkronisasi yang baik, serta pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai secara berkala. Hal ini memastikan bahwa setiap tugas dan program dilaksanakan dengan tertib administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan, guna mencapai pelayanan publik yang prima dan tujuan organisasi yang efektif dan efisien.

3.2. Kendala Dan Upaya Yang Dihadapi Dalam Mengoptimalkan Pembangunan Jalan Di Kabupaten Pandeglang

Dalam upaya mengoptimalkan pembangunan jalan di Kabupaten Pandeglang, terdapat beberapa kendala yang signifikan. Salah satu kendala utama adalah ketidaktegasan dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan. Kurangnya tindakan tegas dari pemerintah terhadap masyarakat yang mendirikan pemukiman secara ilegal menyebabkan minimnya efek jera, sehingga pelanggaran terus berlanjut. Menurut Bapak Ade Juliansyah S.T., M.T., Kabid

Bina Marga, meskipun sanksi telah ada, penerapannya terhambat oleh rasa sungkan dan segan kepada masyarakat.

Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pembangunan dan pemeliharaan jalan juga menjadi kendala. Banyak masyarakat yang belum memahami prosedur dan pentingnya menjaga infrastruktur jalan, yang berdampak pada kurang optimalnya perawatan dan pengelolaan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Bapak Roni Boy Kurniawan S.T., M.T., Kabid Bina Kontruksi, menyatakan bahwa sosialisasi telah dilakukan, namun kesadaran masyarakat dan developer masih rendah.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan beberapa upaya. Evaluasi terhadap sanksi pelanggaran terus dilakukan untuk menegakkan aturan dengan lebih tegas. Selain itu, kegiatan sosialisasi ditingkatkan untuk menyadarkan masyarakat dan developer mengenai pentingnya pembangunan jalan. Sosialisasi ini mencakup seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang serta para developer dan pihak luar.

Meskipun demikian, upaya sosialisasi masih menemui kendala karena keterbatasan waktu dan luasnya wilayah Kabupaten Pandeglang yang membuat penyebaran informasi tidak merata. Kerjasama dengan developer untuk menyumbangkan fasilitas umum dan sosial juga diharapkan dapat menciptakan kawasan terpadu yang mendukung pembangunan infrastruktur jalan yang lebih baik.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Selama melaksanakan penelitian penulis telah menemukan hal yang sama dengan penelitian terdahulu, dimana temuan penelitian penulis adalah kinerja terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dinilai cukup baik. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu, penelitian Bella Fitrianti, Meyzi Heriyanto, dan Seno Andri yang menunjukkan bahwa, produktivitas kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi dalam pemeliharaan infrastruktur jalan telah berjalan dengan baik (Fitrianti et al., 2022). Selanjutnya, Penelitian Arfindy Sri Nur, Ahmad Sihabudin, dan Ace Hasan Syadzily yang berjudul “Kinerja Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Dalam Perspektif Pelayanan Publik Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Banten Tahun 2017” hasil dari penelitian ini adalah kinerja Dinas PUPR Provinsi Banten dapat dikatakan cukup baik mengenai adanya beberapa pembangunan jalan dan jembatan seperti kegagalan pembangunan dan keterlambatan, pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan visi dan misi Organisasi (Nur et al., 2020).

Kemudian terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu, dimana penelitian Jamalia Wahda dan Abdul Sadad yang menunjukkan bahwa, Kinerja DPUPR Kota Pekanbaru masih kurang baik. Hal ini disebabkan oleh Produktivitas Kinerja DPUPR pada pengelolaan drainase masih kurang efektif, karena masih banyaknya titik banjir yang menjadi permasalahannya (Wahda & Sadad. Abdul, 2023). Selanjutnya, Penelitian Hany Amalia yang menunjukkan bahwa, pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam program pembangunan drainase Kota Dumai belum mencapai hasil yang maksimal, dimana dalam pelaksanaannya sumber daya manusia yang berkualitas masih terbatas, anggaran yang kurang memadai dan minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana drainase menjadi sebab program pembangunan drainase yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kurang dirasakan manfaatnya (Amalia, 2021).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dari tanggal 8 Januari 2024 hingga 21 Januari 2024, dapat disimpulkan bahwa kinerja tersebut dinilai cukup baik namun masih memerlukan peningkatan lebih lanjut. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun aspek produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas telah berjalan dengan baik, terdapat beberapa area yang masih perlu ditingkatkan, seperti peningkatan sumber daya manusia untuk memperkuat efisiensi antara input dan output, serta perbaikan infrastruktur dan fasilitas penunjang untuk meningkatkan pelayanan publik secara keseluruhan.

Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang yaitu, Secara keseluruhan, diperlukan peningkatan dalam pengawasan rutin terhadap pelaksanaan tugas serta penerapan program sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya infrastruktur jalan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kesadaran akan pentingnya infrastruktur jalan dalam mendukung pembangunan wilayah. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan untuk menambah jumlah tenaga kerja guna memperkuat pengawasan di lapangan serta meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur jalan. Hal ini akan membantu dalam memastikan bahwa proyek-proyek tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Terakhir, investasi dalam peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung operasional Dinas, seperti infrastruktur fisik dan teknologi informasi, perlu ditingkatkan. Langkah ini akan membantu dalam meningkatkan kapasitas dan efektivitas Dinas dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat miskin melalui program PKH agar dapat memberikan masukan yang lebih luas.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Medan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, H. (2021). Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1–8.
- Andani, D. (2022). Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 4(2), 101–112. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v4i2.1494>

- Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang*. (2022).
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi*. UGM PRESS. <https://books.google.co.id/books?id=rrtjDwAAQBAJ>
- Fitrianti, B., Heriyanto, M., & Andri, S. (2022). Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(3), 2118–2128.
- Gerrish, E. (2016). The Impact of Performance Management on Performance in Public Organizations: A Meta-Analysis. *Public Administration Review*, 76(1), 48–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/puar.12433>
- Labolo, M. (2013). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Raja Grafindo Persada.
- Nur, A. S., Sihabudin, A., & Syadzily, A. H. (2020). Kinerja Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Dalam Perspektif Pelayanan Publik Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Banten Tahun 2017. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 3(1). <https://doi.org/10.31506/jipags.v3i1.5478>
- Simangungsong, F. (2017). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sondari, S., & Nopy, N. (2022). Kinerja Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 3(2), 124–137. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v3i2.1229>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (1985). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Kebijaksanaan*. LPFE-UI.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*. (n.d.).
- Wahda, J., & Sadad. Abdul. (2023). Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam mengelola Drainase di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Binawidya). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9178–9188.
- Yasni, & Nur Fajri. (2022). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar. *Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal*, 3(2), 166–192. <https://doi.org/10.47354/aos.v3i2.322>